

PROPOSAL SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DESA POTO TANO TERHADAP
PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PULAU KENAWA DALAM
MEMBANGUN EKONOMI MASYARAKAT**

**(THE ROLE OF GOVERNMENT POTO TANO VILLAGE TO
DEVELOPMENT TOURIST ATTRACTION OF KENAWA ISLAND IN
BUILDING ECONOMY COMMUNITY)**



DI SUSUN OLEH :

RIO WAHYUDI

NIM. 21511A0065

**JURUSAN URUSAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH MATARAM**

2018

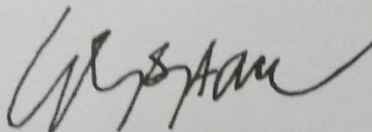
HALAMAN PERSETUJUAN

Proposal ini telah disetujui untuk diseminarkan pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 28 Desember 2018

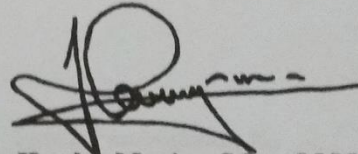
Menyetujui :

Dosen Pembimbing I,



Drs. Mustamin H. Idris, M.S.
NIP.196412102005011003

Dosen Pembimbing II,



Lalu Hendra Maniza, S.Sos., M.M.
NIDN.08281084404

Mengetahui :

**Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Ketua Program Studi**



✓ Rahmad Hidavat, S.AP., M.AP
NIDN.08220448901

HALAMAN PENGESAHAN

PROPOSAL

PERAN PEMERINTAH DESA POTO TANO TERHADAP
PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PULAU KENAWA DALAM
MEMBANGUN EKONOMI MASYARAKAT

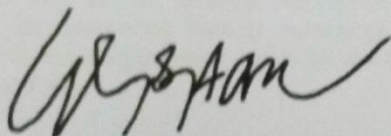
THE ROLE OF GOVERNMENT POTO TANO VILLAGE TO
DEVELOPMENT TOURIST ATTRACTION OF KENAWA ISLAND IN
BUILDING ECONOMY COMMUNITY

Di Susun Oleh :

RIO WAHYUDI
21511A0065

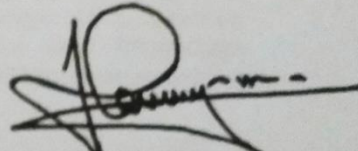
Disetujui :

Dosen Pembimbing I,



Drs. Mustamin H. Idris, M.S.
NIP.196412102005011003

Dosen Pembimbing II,



Lalu Hendra Mantza, S.Sos., M.M.
NIDN.08281084404

Mengetahui

Program Studi Administrasi Publik

Ketua



~ Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP
NIDN.08220448901

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang memberikan rahmat iman, kesehatan, dan kesehatan pada peneliti sehingga dapat menyusun proposal skripsi yang berjudul **“PERAN PEMERINTAH DESA POTO TANO TERHADAP PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PULAU KENAWA DALAM MEMBANGUN EKONOMI MASYARAKAT”** sesuai waktu yang diharapkan. Shalawat serta salam tak lupa penulis panjatkan kepada baginda besar Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam kajahiliahan/kebodohan menuju jalan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dengan tuntunan tersebut, maka manusia dapat memilih antara mana jalan yang lurus dan mana jalan yang sesat.

Penyelesaian proposal ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, melalui kesempatan ini peneliti menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Arsyad Abd.Gani, M.Pd Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Drs. H. M. Junaidi, M.M Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
3. Bapak Drs.Mustamin H.Idris, M.S Selaku Dosen Pembimbing 1 Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
4. Bapak Lalu Hendra Maniza, S.Sos.,M.M Selaku Dosen Pembimbing 2 Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
5. Kepada semua pihak yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dalam proses penyelesaian proposal skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa proposal skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan baik dari isi maupun sistematika penyusunannya. Oleh karnanya, masukan dan saran yang bersifat membangun diharapkan dapat memperkaya khazanah isi dari pada proposal skripsi ini, dan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Mataram, 28 Desember 2018

RIO WAHYUDI
NIM.21511A0065

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Peran Pemerintah Desa	6
B. Pengembangan Pariwisata	13
C. Perencanaan Pembangunan Pariwisata di Daerah	20
D. Pembangunan Ekonomi Masyarakat	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	28
B. Penentuan Responden	28
C. Jenis dan Sumber Data	29
D. Teknik Pengumpulan Data	30
E. Teknik Analisis Data	31
F. Keabsahan Data	32
DAFTAR PUSTAKA.....	35
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir.....	12
-------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu bidang yang perlu dikembangkan, dikelola dalam pembangunan karena pariwisata merupakan salah satu sumber devisa Negara yang sangat potensial dalam membangun perekonomian Negara. Selain itu pariwisata juga dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan taraf kehidupan, bahkan mempererat persaudaraan antar bangsa dan memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada Negara lain.

Menurut Wahab (2003:5) Pariwisata adalah salah satu dari industri gaya baru, yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain di dalam Negara penerima wisatawan. Kegiatan-kegiatan ini dapat menambah pendapatan masyarakat dan menekannya tingkat pengangguran. Upaya pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan nasional untuk meningkatkan lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan Kabupaten dan pendapatan negara serta penerimaan devisa. Mengingat luasnya kegiatan yang harus dilakukan untuk mengembangkan kepariwisataan, maka perlu dukungan dan peran serta yang aktif dari Pemerintah dan masyarakat.

Didukung dengan penerapan otonomi Kabupaten merupakan kesempatan bagi Kabupaten (Kabupaten dan Kota) untuk dapat menggali, mengembangkan serta mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Oleh sebab itu Kabupaten sangat perlu mengamati sektor-sektor yang berpotensi dijadikan sebagai tempat

wisata yang nantinya dapat menjadi sumber pemasukan untuk Kabupaten masing-masing salah satunya wisata yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat.

Kabupaten Sumbawa Barat memiliki banyak wisata yang menarik untuk dikunjungi salah satunya objek wisata Pulau Kenawa yang terletak di Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat. Pulau Kenawa merupakan salah satu pulau di gugusan pulau Gili Balu yang mempunyai luas 13,8 ha sedangkan garis pantai yang membentang sepanjang 1,73 km. Daratan Pulau Kenawa di dominasi oleh padang rumput yang hampir lebih dari sebagian luas pulau, vegetasi mangrove menutupi sekitar $\frac{1}{4}$ garis pantai.

Dalam pengembangan objek wisata Pulau Kenawa, peran Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat khususnya Pemerintah Desa Poto Tano sangatlah penting dalam pembangunan pariwisata guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, salah satunya melakukan kegiatan promosi untuk menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke lokasi wisata Pulau Kenawa. Sebagaimana yang kita ketahui dengan cara promosi wisatawan dapat mengetahui informasi perihal obyek wisata tersebut.

Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program pemasaran. Pada hakikatnya promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran yaitu aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi/membujuk, dan atau mengingatkan sasaran agar dapat menerima dan loyal pada produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan (Tjiptono, 2000:219).

Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ekonomi Kabupaten Sumbawa Barat khususnya Desa Poto Tano. Dalam menunjang kegiatan wisatawan Pemerintah Kabupaten Desa Poto

Tano menyediakan fasilitas penyewaan perahu milik masyarakat yang ada di dermaga untuk penyeberangan ke pulau dan ketika sampai di Pulau Kenawa wisatawan juga difasilitasi dengan saung yang bisa digunakan untuk bercengkerama dengan keluarga atau teman sambil menikmati keindahan pulau dan di pulau kenawa terdapat juga kios-kios milik masyarakat Desa Poto Tano yang menjual berbagai macam makanan dan minuman untuk wisatawan.

Dari segi keindahan alam Pulau Kenawa menyimpan banyak keindahan, salah satunya keindahan padang savana yang hijau di musim hujan dan cokelat eksotis di musim kemarau serta keindahan pasir putihnya yang terhampar di sepanjang bibir pantai sangat cocok untuk kegiatan berjemur bagi para wisatawan. Bagi wisatawan yang ingin mengeksplor seluruh keindahan Pulau Kenawa banyak kegiatan yang menarik yang bisa dilakukan di pulau ini yakni, melakukan snorkeling (menyelam) menikmati keindahan bawah laut pulau kenawa dan bagi wisatawan yang hobi mendaki, di Pulau Kenawa terdapat sebuah Bukit yang bisa didaki oleh wisatawan dan ketika sampai di atasnya wisatawan bisa menyaksikan indahnya matahari terbenam (sunset) sambil berfoto mengabadikan momen bersama teman-teman ataupun keluarga.

Selain kegiatan mendaki bukit dan snorkeling, kegiatan berkemah di malam hari terasa sangat asyik di Pulau ini, suasana saat malam begitu tenang karena memang pulau ini tidak berpenghuni, serta suara ombak di pantainya menjadi kenikmatan tersendiri bagi para wisatawan ketika berkemah disini. Dalam hal ini Pemerintah Desa Poto Tano harus lebih mengembangkan kegiatan pariwisata di Pulau Kenawa agar dapat memberikan dampak positif terhadap kondisi lingkungan fisik, kondisi ekonomi, sosial dan budaya

masyarakat sekitar kawasan wisata tersebut, khususnya penduduk Desa Poto Tano .

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penting kiranya bagi saya sebagai mahasiswa melakukan penelitian tentang bagaimana peran Pemerintah Desa Poto Tano dalam mengembangkan objek wisata Pulau Kenawa dalam menumbuhkan ekonomi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa sajakah strategi Pemerintah Desa Poto Tano dalam mengembangkan objek wisata Pulau Kenawa?
2. Sejauh manakah pengaruh pengembangan objek wisata Pulau Kenawa terhadap pembangunan ekonomi masyarakat?
3. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan objek wisata Pulau Kenawa?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui strategi Pemerintah Desa Poto Tano dalam mengembangkan objek wisata Pulau Kenawa

- b. Untuk mengetahui pengaruh pengembangan objek wisata Pulau Kenawa terhadap pembangunan ekonomi masyarakat.
- c. Untuk mengidentifikasi faktor kekuatan dan hambatan dalam pengembangan objek wisata Pulau Kenawa.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan satu kegunaan yang nantinya dapat menjadi bahan informasi atau refrensi pihak lain, yaitu sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian dapat menjadi bahan masukan atau pedoman bagi Pemerintah Desa Poto Tano dalam mengembangkan wisata Pulau Kenawa bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat.

c. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk penyelesaian studi Sarjana Ilmu Administrasi Publik di Universitas Muhammadiyah Mataram.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Pemerintah Desa

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran (Thoha, 1997).

Sedangkan peranan menurut Soekanto (2001:268) memberikan pengertian tentang peranan, peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan, perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya, tak ada peranan tanpa ada kedudukan, atau kedudukan tanpa peranan, sebagaimana halnya dengan kedudukan.

Peranan adalah suatu perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan dan sebagai tolak ukur seseorang sebagai seorang pemimpin apakah orang itu dapat meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas – tugas yang diberikan kepadanya sehingga akan membuat orang tersebut dapat memaksimalkan kinerja dalam menjalankan tugas-tugasnya. Peranan didefinisikan dari masing – masing pakar

diantaranya peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin didalam sebuah organisasi mempunyai peran, setiap pekerjaan membawa harapan bagaimana penanggung peran berperilaku. Fakta bahwa organisasi mengidentifikasi pekerjaan yang harus dilakukan dan perilaku peran yang diinginkan yang berjalan seiring pekerjaan tersebut juga mengandung arti bahwa harapan mengenai peran penting dalam mengatur perilaku bawahan.

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan desa karena kepala desa yang memegang peran yaitu sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desa.

Kepala Desa harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, dan sifat kepemimpinan, disamping menjalankan kegiatan-kegiatan, koordinasi, fungsi, peran dan tanggung jawab. Mengenai peran Kepala Desa, dalam melaksanakan pembangunan diwilayahnya adalah sebagai perencana pembangunan, pengawas pembangunan, dan pelopor pembangunan. Peran Kepala Desa sangat penting dalam mengadakan pendekatan dan menumbuhkan serta mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat untuk dapat merealisasikan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Hal ini berarti bahwa Kepala Desa sebagai pemimpin di Desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab dalam bidang pemerintahan, pembangunan

dan kemasyarakatan, juga Kepala Desa bertanggung jawab dalam menumbuhkan dan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat (Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014).

Mengingat unit pemerintahan desa adalah bagian integral dari pemerintahan nasional, maka pembahasan tentang tugas dan fungsi pemerintah desa tidak terlepas dari tugas dan fungsi pemerintahan nasional seperti yang telah diuraikan dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pada pasal 127 tentang tugas pokok Kepala Desa yaitu :

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Pelayanan masyarakat
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

Menurut Zainun (1990:3-5) terdapat empat kunci pokok tugas dan fungsi administrasi dan manajemen pemerintahan yaitu :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan umum
2. Kepemimpinan
3. Pengawasan
4. Koordinasi

Keempat fungsi administrasi dan manajemen ini akan diterapkan pada setiap tingkat pemerintahan yang ada dalam susunan pemerintahan negara Republik Indonesia. Berdasarkan tugas fungsi pemerintahan tersebut, berarti pemerintahan desa sebagai bagian integral dari pemerintahan nasional juga menyelenggarakan fungsi-fungsi tersebut meskipun dalam ruang lingkup yang

lebih sempit. Oleh unit pemerintahan desa seperti halnya pemerintah desa sebagai unit pemerintahan terendah mempunyai 3 fungsi pokok yaitu :

1. Pelayanan kepada masyarakat
2. Fungsi operasional atau manajemen pembangunan,
3. Fungsi ketatausahaan atau registrasi (Sawe,1996:99)

Keseluruhan tugas dan fungsi administrasi pemerintah desa tersebut, tidak akan terlaksana dengan baik, manakala tidak ditunjang dari aparatnya dengan melaksanakan sebaik-baiknya apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing aparat. Menyadari betapa pentingnya tugas administrasi pemerintahan desa, maka yang menjadi keharusan bagi Kepala Desa dan aparatnya adalah berusaha untuk mengembangkan kecakapan dan keterampilan mengelolah organisasi pemeritahan desa termasuk kemampuannya untuk melaksanakan tugas-tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Selanjutnya menurut Beratha (1992:37) mengemukakan bahwa tugas pemerintah desa termasuk dalam menjalankan administrasi adalah sebagai berikut :

1. Tugas bidang pemerintahan.
2. Tugas bidang pelayanan Kepala masyarakat.
3. Tugas bidang ketatausahaan.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang tugas-tugas administrasi pemerintahan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Tugas bidang pemerintahan, meliputi :

1. Registrasi dilakukan dalam berbagai buku register mengenai berbagai hal dan peristiwa yang menyangkut kehidupan tindakan masyarakat berdasarkan laporan yang diperoleh melalui sub pelayanan umum dari masyarakat yang berkepentingan.
2. Tugas-tugas umum meliputi : menerima dan melaksanakan instruksi-instruksi dan petunjuk-petunjuk dari pemerintahan kecamatan dan pemerintah kabupaten mengenai pemerintahan, tugas-tugas teknis, ketertiban, kesejahteraan dan keamanan,
3. Membuat laporan periodik mengenai keadaan dan perubahan penduduk, keamanan serta sosial ekonomi.
4. Melaksanakan hal-hal yang sudah menjadi keputusan ditingkat desa.
5. Melaksanakan kerjasama dengan instansi ditingkat Desa dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan tanah.

Tugas bidang pelayanan umum, meliputi :

1. Pemberian bermacam-macam izin, seperti izin tempat tinggal, izin meninggalkan desa, izin usaha dan izin pendirian pembangunan.
2. Memberikan macam-macam keterangan seperti : bukti diri, keterangan catatan kepolisian dan sebagainya.

Dokumentasi data, keadaan wilayah, laporan keuangan dan lain-lain.

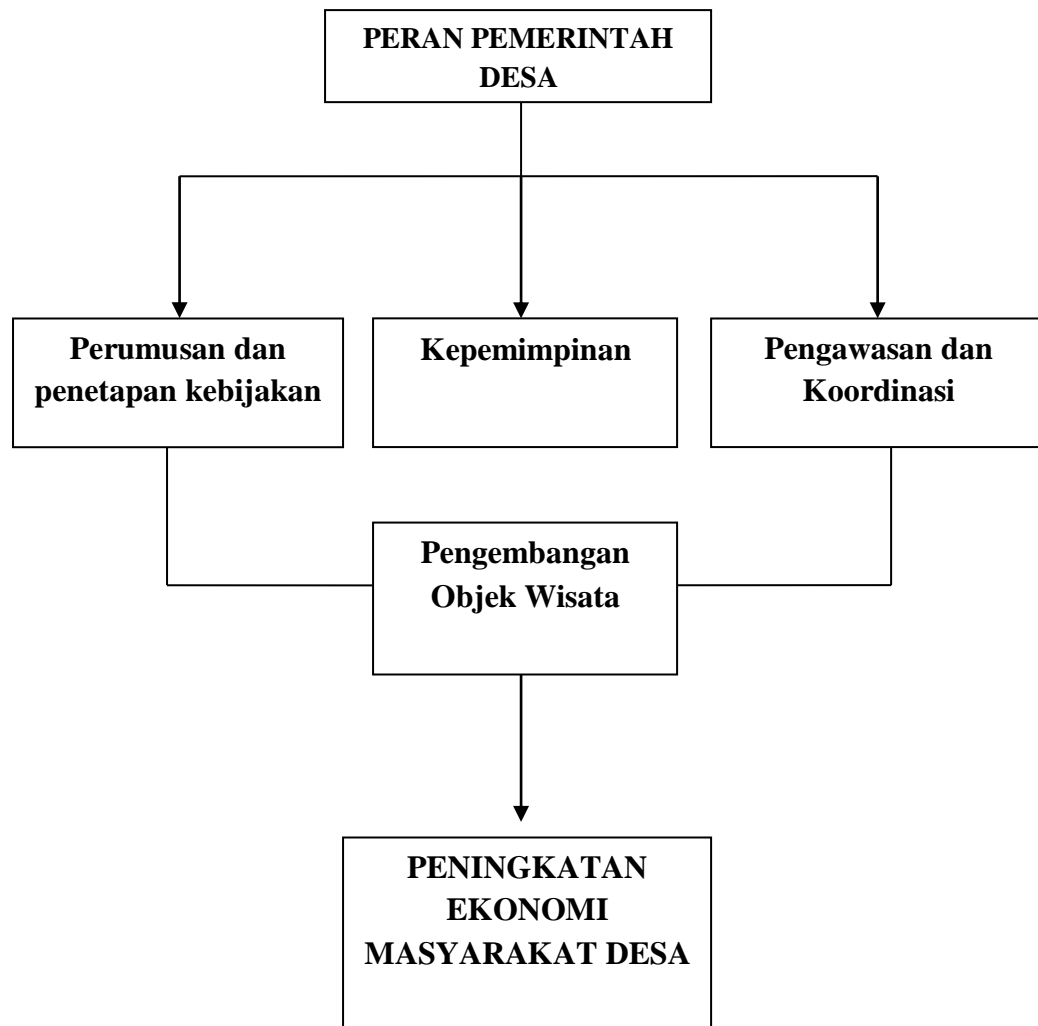
Sementara itu, menurut Instruksi Mendagri Nomor 21 Tahun 1992 ditegaskan bahwa Pemerintah desa mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan

daerah wilayahnya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pemerintah Desa mempunyai fungsi yaitu :

1. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
2. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat.
4. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan Ketentraman dan ketertiban wilayah.
5. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada pemerintah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi desa tersebut, selanjutnya dijabarkan menjadi tugas dan fungsi masing-masing unsur aparat baik Kepala Desa maupun aparatnya yang terdiri dari : Sekretaris, Kepala-Kepala Urusan, Kepala-Kepala Lingkungan.

Kerangka Pikir



Gambar. 1

Diadopsi dari Teori :

Sawe, (1996:99)

Beratha (1992:37)

Zainun (1990:3-5)

Yoeti (2005)

Todaro (2006)

B. Pengembangan Pariwisata

Definisi Pariwisata Sebagai antisipasi perkembangan dunia pariwisata yang telah mengglobal sifatnya, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang terdiri atas tujuh belas bab dan tujuh puluh pasal yang mengandung ketentuan meliputi delapan hal, yaitu :

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
5. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
6. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum,

fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

7. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
8. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

Adapun jenis-jenis wisata menurut Pendit (1999) antara lain :

1. Wisata Budaya

Wisata budaya adalah perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ketempat lain, mempelajari keadaan rakyat dan kebiasaan adat istiadat, budaya dan seni mereka

2. Wisata Konvensi

Wisata Konvensi adalah wisata yang menyediakan fasilitas bangunan dengan ruangan-ruangan tempat bersidang bagi peserta konvensi, atau pertemuan lainnya yang bersifat nasional maupun internasional.

3. Wisata Sosial

Wisata Sosial adalah perorganisasian suatu perjalanan murah serta mudah untuk memberikan kesempatan kepada golongan masyarakat ekonomi lemah untuk mengadakan perjalanan seperti misalnya kaum buruh, pemuda, pelajar atau mahasiswa, petani dan sebagainya.

4. Wisata Cagar Alam

Wisata Cagar Alam adalah wisata yang diselenggarakan agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan jalan mengatur wisata

ketempat atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan daerah pegunungan dan sebagainya yang pelestariaannya dilindungi oleh undang-undang.

5. Wisata Bulan Madu

Wisata Bulan Madu adalah suatu penyelenggaraan perjalanan bagi pasangan-pasangan pengantin baru yang sedang berbulan madu, dengan fasilitas-fasilitas khusus, tersendiri demi kenikmatan perjalanan dan kunjungan mereka.

Pengembangan pariwisata adalah usaha yang dilakukan secara sadar dan berencana untuk memperbaiki obyek wisata yang sedang di pasarkan ataupun yang akan di pasarkan. Pengembangan tersebut meliputi perbaikan obyek dan pelayanan kepada wisatawan semenjak berangkat dari tempat tinggalnya menuju tempat tujuan hingga kembali ke tempat semula (Yoeti, 1983:56).

Lebih lanjut Yoeti (2005) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan suatu objek wisata, yaitu:

1. Objek wisata itu harus mempunyai sesuatu yang menarik untuk dilihat dan tentunya berbeda dengan yang dimiliki tempat lain (*something to see*).
2. Dilokasi objek wisata harus tersedia kegiatan yang dapat dilakukan oleh visitor (*fishing, tracking, dll*).
3. Dilokasi objek wisata harus tersedia dengan apa yang disebut *something to buy*.

Dalam pengembangan objek wisata perlu diperhatikan kelengkapan sarana dan prasarna, yang dimaksud sarana adalah semua bentuk pelayanan yang dapat diberikan kepada wisatawan. Sedangkan yang dimaksud dengan prasarana adalah semua fasilitas yang dapat memungkinkan proses

perekonomian berjalan dengan lancar sedemikian rupa sehingga dapat memudahkan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam pengertian ini yang dimaksud dalam sarana adalah :

1. Akomodasi
2. Restoran
3. Toko souvenir

Sedangkan prasarana adalah :

1. Sistem penyediaan air bersih
2. Pembangkit tenaga listrik
3. Jaringan jalan raya
4. Telekomunikasi

Pengembangan pariwisata sebagai suatu industri secara ideal harus berlandaskan pada empat prinsip dasar, sebagaimana dikemukakan Sobari (dalam Anindita, 2015), yaitu :

1. Kelangsungan ekologi, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus menjamin terciptanya pemeliharaan dan proteksi terhadap sumberdaya alam yang menjadi daya tarik pariwisata, seperti lingkungan laut, hutan, pantai, danau, dan sungai.
2. Kelangsungan kehidupan sosial dan budaya, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus mampu meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan tata kehidupan melalui sistem nilai yang dianut masyarakat setempat sebagai identitas masyarakat tersebut.

3. Kelangsungan ekonomi, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus dapat menciptakan kesempatan kerja bagi semua pihak untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi melalui suatu sistem ekonomi yang sehat dan kompetitif.
4. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat melalui pemberian kesempatan kepada mereka untuk terlibat dalam pengembangan pariwisata.

Sedangkan menurut Yoeti (1997) berkembangnya pariwisata tergantung pada produksi industri pariwisata yang meliputi daya tarik wisata, kemudahan perjalanan, sarana dan fasilitas serta promosi. Negara yang sadar akan pengembangan pariwisata berdasarkan Direktorat Jenderal Pariwisata biasa mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Perencanaan pengembangan pariwisata harus menyeluruh sehingga seluruh bagi pengembangan pariwisata di perhitungkan dengan memperhatikan pula perhitungan untung rugi apabila dibandingkan dengan pembangunan sektor lain.
2. Pengembangan pariwisata harus diintegrasikan ke dalam pola dan program pembangunan semasa ekonomi, fisik dan sosial sesuatu negara.
3. Pengembangan pariwisata harus diarahkan sedemikian rupa sehingga membawakan kesejahteraan ekonomi yang tersebar luas dalam masyarakat.
4. Pengembangan pariwisata harus sadar lingkungan sehingga pengembangannya mencerminkan ciri-ciri khas budaya dan lingkungan alam sesuatu negara, bukannya justru merusak lingkungan alam dan budaya yang khas itu.

5. Pengembangan pariwisata harus diarahkan sedemikian rupa sehingga pertentangan sosial dapat dicegah seminimal mungkin dan dapat menimbulkan perubahan-perubahan sosial yang positif.
6. Penentuan tatacara pelaksanaannya harus disusun sejelas-jelasnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang masak sesuai kemampuan.
7. Pencatatan (*monitoring*) secara terus-menerus mengenai pengaruh pariwisata terhadap suatu masyarakat dan lingkungan sehingga merupakan bahan yang baik untuk meluruskan kembali akibat perkembangan pariwisata yang merugikan sehingga merupakan sarana pengendalian pengembangan yang terarah.

Menurut Santoso (dalam Kurniawan, 2015) unsur-unsur pengembangan pariwisata meliputi:

1. Atraksi

Atraksi atau daya tarik dapat timbul dari keadaan alam (keindahan panorama, flora dan fauna, sifat khas perairan laut, danau), obyek buatan manusia (museum, katedral, masjid kuno, makam kuno dan sebagainya), ataupun unsur-unsur dan peristiwa budaya (kesenian, adat istiadat, makanan dan sebagainya).

2. Transportasi

Perkembangan transportasi berpengaruh atas arus wisatawan dan juga perkembangan akomodasi. Di samping itu perkembangan teknologi transportasi juga berpengaruh atas fleksibilitas arah perjalanan, Jika angkutan dengan kereta api bersifat linier, tidak banyak cabang atau kelokannya, dengan kendaraan mobil arah perjalanan dapat menjadi lebih bervariasi. Demikian pula dengan angkutan pesawat terbang yang dapat melintasi berbagai rintangan alam (waktu yang lebih singkat).

3. Akomodasi

Tempat menginap dapat dibedakan antara yang dibangun untuk keperluan umum (hotel, motel, tempat pondokan, tempat berkemah waktu liburan) dan yang diadakan khusus peorangan untuk menampung menginap keluarga, kenalan atau anggota perkumpulan tertentu atau terbatas.

4. Fasilitas Pelayanan

Penyediaan fasilitas dan pelayanan makin berkembang dan bervariasi sejalan dengan perkembangan arus wisatawan. Perkembangan pertokoan dan jasa pelayanan pada tempat wisata dimulai dengan adanya pelayanan jasa kebutuhan sehari-hari (penjual makanan, warung minum atau jajanan), kemudian jasa-jasa perdagangan (pramuniaga, tukang-tukang atau jasa pelayanan lain), selanjutnya jasa untuk kenyamanan dan kesenangan (toko pakaian, toko perabot rumah tangga, dll), lalu jasa yang menyangkut keamanan dan keselamatan (dokter, apotek, polisi dan pemadam kebakaran) dan pada akhirnya perkembangan lebih lanjut menyangkut juga jasa penjualan barang mewah.

5. Infrastruktur

Infrastruktur yang memadai diperlukan untuk mendukung jasa pelayanan dan fasilitas pendukung. Pembangunan infrastruktur secara tidak langsung juga memberi manfaat (dapat digunakan) bagi penduduk setempat disamping mendukung pengembangan pariwisata. Hal ini menyangkut tidak saja pembangunan infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, jalan kereta api, dll), tetapi juga penyediaan saluran air minum, penerangan listrik, dan juga saluran pembuangan limbah.

C. Perencanaan Pembangunan Pariwisata di Daerah

Susanto (2016), Melakukan penelitian dengan judul : Perencanaan Pembangunan Pariwisata di Daerah kabupaten Pekalongan. Penelitian ini menyimpulkan Pembangunan pariwisata di daerah bertujuan ikut serta dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan antara desa dan kota. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi program pembangunan pariwisata yang dilaksanakan di daerah dilihat dari aspek pembangunan destinasi, pemasaran dan pembangunan kelembagaan. Program pengembangan destinasi masih didominasi pembangunan sarana dan prasarana, kurang memperhatikan pembangunan atraksi secara berkelanjutan, pembangunan pemasaran masih terjebak pada rutinitas tahunan belum mengacu pada model pemasaran modern.

Aspek Pemasaran pariwisata dalam pelaksanaan program masih dilakukan melalui pameran, penyelenggaraan event serta belum memanfaatkan teknik pemasaran yang lebih modern. Aspek kelembagaan dalam pelaksanaan program dilaksanakan dengan melakukan pembentukan kelompok sadar wisata di kawasan destinasi wisata utama guna menunjang akselerasi pembangunan pariwisata daerah. Selain itu juga telah diupayakan pembinaan melalui pelatihan, dan studi banding. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pariwisata masih belum memuaskan, tingkatan partisipasi masih dalam tingkatan partisipasi semu.

Program pembangunan kelembagaan telah menumbuhkan lembaga-lembaga pariwisata di masyarakat namun belum efektif karena keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, aksesibilitas, kurangnya sarana dan prasarana serta keterbatasan anggaran. Model pembangunan yang

dianjurkan adalah pembangunan pariwisata berbasis komunitas yang lebih memperhatikan partisipasi masyarakat, keberlanjutan lingkungan dan sosial budaya.

D. Pembangunan Ekonomi Masyarakat

Irawan dan Suparmoko (1992) berpendapat bahwa tujuan dari pembangunan ekonomi selain dari meningkatkan pendapatan nasional riil namun juga untuk meningkatkan produktivitas. Maka dari itu masyarakat dituntut sebagai sumber daya manusia agar dapat terus bergerak dan dapat memanfaatkan sumber daya alam dan memacu perekonomian negara agar terus berkembang dan menambah dan menaikkan pendapatan nasional.

Hampir semua negara di dunia tengah bekerja keras untuk melaksanakan pembangunan. Kemajuan ekonomi memang merupakan komponen utama pembangunan, tetapi itu bukan satu-satunya komponen. Pada dasarnya pembangunan itu bukan hanya sebuah fenomena ekonomi. Karena pada akhirnya, proses pembangunan harus mampu membawa umat manusia melampaui pengutamaan materi dan aspek-aspek keuangan dari kehidupannya sehari-hari (Todaro, 2006 : 124).

Dalam konteks pembangunan nasional maupun Kabupaten, pembangunan yang dilakukan sebagai suatu pembangunan ekonomi, hal tersebut dapat dibenarkan karena pembangunan bukan hanya berarti penekanan pada akselerasi dan peningkatan dalam pertumbuhan perkapita sebagai indeks dari pembangunan, tetapi pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang meliputi pula reorganisasi dan pembaharuan seluruh sistem dan aktifitas ekonomi dan sosial dalam mensejahterakan

kehidupan masyarakat. Pembangunan bukan semata-mata merupakan fenomena ekonomi. Dalam pengertian yang paling mendasar, pembangunan haruslah mencakup masalah materi dan finansial dalam kehidupan manusia. Proses pembangunan di semua masyarakat menurut Todaro (2006) paling tidak harus memiliki tiga tujuan inti, yakni:

1. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan aman.
2. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, semua itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan.
3. Perluasan pilihan-pilihan ekonomi dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya kepada orang dan negara-bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka (Todaro, 2000).

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses perbaikan kualitas seluruh bidang kehidupan masyarakat yang meliputi tiga aspek-aspek penting yaitu :

1. Peningkatan standar hidup tiap orang (pendapatan, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan lain-lain).

2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self esteem) setiap orang melalui pembentukan segenap sistem ekonomi dan lembaga (institution) sosial, politik dan juga ekonomi yang mampu mempromosikan jati diri dan penghargaan hakikat kemanusiaan.
3. peningkatan kebebasan setiap orang serta peningkatan kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang dimiliki (Todaro, 2006).

Menurut Basuki dan Prawoto (2014) faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi yaitu :

1. Sumber-sumber Alam

Faktor ini meliputi luas tanah, sumber mineral tambang, iklim dan lain lain. Sumber daya alam yang sedikit merupakan kendala yang serius yang dimiliki oleh negara-negara yang sedang berkembang. Bahkan kendala sumber daya alam ini dinilai lebih serius dibandingkan dengan sedikitnya kuantitas dan rendahnya persediaan kapital dan sumber daya manusia.

2. Sumber-sumber Tenaga Kerja

Masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang di bidang sumber daya manusia adalah jumlah penduduknya yang terlalu banyak, daya gunanya yang rendah dan kualitas dari penduduk masih rendah.

3. Kualitas Tenaga Kerja yang Rendah

Kelemahan dari negara-negara sedang berkembang yang belum mampu untuk mengadakan investasi yang memadai dalam rangka menaikkan kualitas sumber daya manusia yang berupa pengeluaran untuk memelihara kesehatan, pendidikan, dan latihan ketenagakerjaan untuk penduduk.

4. Akumulasi Kapital

Usaha-usaha dalam proses mendorong laju pertumbuhan ekonomi dipusatkan kepada akumulasi kapital yang penting dalam pertumbuhan ekonomi.

Menurut Hutomo (2000) Dalam upaya Pemberdayaan dan peningkatan Ekonomi Masyarakat pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Disamping itu masyarakat juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak amil zakat, inilah yang membedakan antara partisipasi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat.

Perlu difikirkan siapa sesungguhnya yang menjadi sasaran pemberdayaan masyarakat, sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun, dengan ini *good governance* yang telah dielu-elukan sebagai suatu pendekatan yang dipandang paling relevan, baik dalam tatanan pemerintahan secara luas maupun dalam menjalankan fungsi pembangunan.

Good governance adalah tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjalin adanya proses kesejahteraan, kesamaan, dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan komponen pemerintah, rakyat dan usahawan swasta Dalam kondisi ini mengetengahkan tiga pilar yang harus diperlukan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ketiga pilar tersebut adalah pemerintah, swasta dan masyarakat yang hendaknya menjalin hubungan kemitraan yang selaras.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Pemberdayaan masyarakat hendaknya mengarah pada pembentukan masyarakat yang lebih baik, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses.

Ada dua upaya agar pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa dijalankan, diantaranya *pertama*, mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha. Karena kiat Islam yang pertama dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan bekerja. Dengan memberikan bekal pelatihan, akan menjadi bekal yang amat penting ketika akan memasuki dunia kerja. Program pembinaan untuk menjadi seorang wiraswasta ini dapat dilakukan melalui beberapa tahap kegiatan, diantaranya :

Memberikan bantuan motivasi moril, bentuk motivasi moril ini berupa penerangan tentang fungsi, hak dan kewajiban manusia dalam hidupnya yang pada intinya manusia diwajibkan beriman, beribadah, bekerja dan berikhtiar dengan sekuat tenaga sedangkan hasil akhir dikembalikan kepada Dzat yang Maha Pencipta. Bentuk-bentuk motivasi moril itu adalah:

1. Pelatihan Usaha

Melalui pelatihan ini setiap peserta diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan dengan segala macam seluk beluk permasalahan yang ada didalamnya. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan aktual sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap masyarakat disamping diharapkan memiliki pengetahuan teknik

kewirausahaan dalam berbagai aspek. Pelatihan sebaiknya diberikan lebih aktual, dengan mengujikan pengelolaan praktek hidup berwirausaha, baik oleh mereka yang memang bergelut di dunia usaha, atau contoh-contoh konkrit yang terjadi dalam praktek usaha. Melalui pelatihan semacam ini diharapkan dapat mencermati adanya kiat-kiat tertentu yang harus ia jalankan, sehingga dapat dihindari sekecil mungkin adanya kegagalan dalam pengembangan kegiatan wirausahanya.

2. Permodalan

Permodalan dalam bentuk uang merupakan salah satu faktor penting dalam dunia usaha, tetapi bukan yang terpenting untuk mendapatkan dukungan keuangan, baik perbankan maupun dana bantuan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lainnya. Penambahan modal dari lembaga keuangan, sebaiknya diberikan, bukan untuk modal awal, tetapi untuk modal pengembangan, setelah usaha itu dirintis dan menunjukkan prospeknya yang cukup baik, karena jika usaha itu belum menunjukkan perkembangan profit yang baik, sering kali bank tidak akan memberikan pinjaman.

Dampak Ekonomi Masyarakat Dari Pariwisata menurut Santosa (2011) mengklasifikasikan dampak ekonomi yang timbul akibat adanya pariwisata, terdiri dari efek langsung, efek tidak langsung dan efek induksi. Dimana efek tidak langsung dan efek induksi termasuk efek sekunder, sedangkan efek tidak langsung merupakan efek primer. Dampak total ekonomi pariwisata adalah keseluruhan jumlah dari pengaruh yang terjadi secara langsung atau tidak, dan dapat diukur sebagai pengeluaran bruto atau penjualan, penghasilan, penempatan tenaga kerja dan nilai tambah. Menurut Cohen (dalam Hirawan, 2008) dampak

sosial pariwisata dapat dikelompokkan ke dalam sepuluh kelompok besar, antara lain :

1. dampak terhadap keterkaitan dan keterlibatan antara masyarakat setempat dengan masyarakat yang lebih luas, termasuk tingkat otonomi dan ketergantungan.
2. dampak terhadap hubungan interpersonal antar anggota masyarakat.
3. dampak terhadap dasar-dasar organisasi kelembagaan sosial.
4. dampak terhadap migrasi dari dan ke Kabupaten pariwisata.
5. dampak terhadap ritme kehidupan sosial masyarakat.
6. dampak terhadap pola pembagian kerja.
7. dampak terhadap statifikasi dan mobilisasi sosial.
8. dampak terhadap distribusi pengaruh dan kekuasaan.
9. dampak terhadap meningkatnya penyimpangan-penyimpangan sosial.
10. dampak terhadap bidang kesenian dan adat istiadat.

Cohen juga mengelompokkan dampak ekonomi pariwisata, meliputi :

1. dampak terhadap penerimaan devisa.
2. dampak terhadap pendapatan masyarakat. ‘
3. dampak terhadap kesempatan kerja.
4. dampak terhadap harga-harga.
5. dampak terhadap distribusi manfaat/keuntungan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penempatan lokasi penelitian bagi penelitian ilmiah memang memerlukan berbagai pertimbangan ilmiah maupun pertimbangan pertimbangan praktisnya. Pertimbangan ilmiahnya, apakah lokasinya tersebut terdapat masalah yang banyak dikaji secara ilmiah, bahwa objek tersebut adalah mudah dijangkau, efektif, dan efisien dari segi waktu dan biaya.

Untuk itu penelitian ini berlokasi di Desa Poto Tano (kawasan objek wisata Pulau Kenawa) dengan alasan penyusun memilih lokasi penelitian tersebut yaitu, penyusun tertarik untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa Poto Tano Terhadap Pengembangan Objek Wisata Pulau Kenawa Dalam Membangun Ekonomi Masyarakat.

B. Penentuan Informan

Penentuan Informan dalam penelitian ini terdiri dari Informan utama yakni Dinas Paeriwisata dan kebudayaan Sumbawa Barat, Camat, dan kepala Desa Poto Tano dan sebagai Informan pendukung yaitu para pelaku usaha yang ada di sekitar Objek wisata dan wisatawan yang berkunjung ke Pulau Kenawa. Maka Informan yang dipilih dalam wawancara penelitian ini adalah :

1. Kepala dan Staf Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Camat dan Staf Kecamatan Poto Tano.

3. Kepala Desa dan Staf Desa Poto Tano
4. Pelaku Usaha Yang Ada Di Kawasan Wisata Pulau Kenawa.
5. Wisatawan Yang Berkunjung Ke Objek Wisata Pulau Kenawa.

C. Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2013:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian jenis datanya dibagi dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.

Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada 2 yakni :

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dilapangan dari responden yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang peneliti lakukan. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi lapangan dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian dilapangan.

2. Data Sekunder

Merupakan Data pelengkap atau penunjang, Data primer dikumpulkan dari data yang sesuai. Data ini dapat berupa dokumen, arsip, majalah, dan foto-foto yang berhubungan dengan keperluan peneliti. Data ini digunakan untuk mendukung informasi dari data primer yang diperoleh baik dari wawancara maupun observasi langsung ke lapangan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan wilayah sumber data yang dijadikan subjek penelitian, maka dalam hal ini peneliti mengambil teknik sample (sampilng). Teknik sampel disini menggunakan purposive sampling yaitu penentuan sample dengan pertimbangan tertentu (sugiyono, 2012:96). Sampel ini, lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif atau penelitian yang tidak melakukan generalisasi.

1. Teknik Pengumpulan Data Primer Menggunakan :

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si pewawancara dengan responden atau informan dengan menggunakan alat yang di namakan interview guide / Panduan Wawancara (Nazir, 2014). Metode wawancara di gunakan sebagai sumber data primer atau sebagai sumber data yang utama dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan data atau informasi yang meyakinkan dan dapat dipertanggungjawabkan, maka peneliti melakukan wawancara dengan Informan yang telah ditentukan.

b. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung atas segala sesuatu yang mempunyai kaitannya dengan masalah penelitian yang diperkirakan sulit untuk dinyatakan terhadap segala aktivitas Peran Pemerintah Desa Poto Tano Terhadap Pengembangan Objek Wisata Pulau Kenawa Dalam Membangun Ekonomi Masyarakat.

c. Angket

Angket adalah suatu alat pengumpulan data berupa serangkaian pernyataan yang diajukan pada responden untuk mendapatkan jawaban.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder Menggunakan :

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, mereka dapat berupa catatan anekdot, surat, buku harian, dan dokumen-dokumen mengenai kinerja dilakukan dan data lainnya yang menunjang untuk validnya data yang dituangkan dalam proposal ini.

b. Library Researc

Teknik Library Researc (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (perpustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.

E. Tekhnik Analisis Data

Dalam sugiyono (2012), Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang wawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu dan diperoleh data yang kredibel.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Desa Poto Tano dalam mengembangkan objek wisata Pulau Kenawa dalam menumbuhkan ekonomi masyarakat sehingga digunakan analisis interaktif fungsional yang terdiri dari empat kegiatan, yaitu : pengumpulan data, reduksi data, penyajian

data, dan verifikasi data. tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui wawancara maupun dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap.
2. Reduksi data dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesana pula akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
3. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan untuk memeriksa, mengatur, serta mengelompokkan data sehingga menghasilkan data yang deskriptif.
4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan adalah tujuan ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang timbul dari data yang dapat diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya merupakan validitasnya.

Dengan demikian, maka kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, maka dapat dijawab melalui rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian dilakukan di lapangan.

F. Keabsahan Data

Dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut, dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber yang lainnya. Beberapa macam triangulasi data sendiri menurut Denzin dalam Moleong (2004 : 330) yaitu dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori ada beberapa macam yaitu :

1. Triangulasi Sumber (data)

Triangulasi ini membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda dalam metode kualitatif.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi ini menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi penyidikan

Triangulasi ini dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Contohnya membandingkan hasil pekerjaan seorang analisis dengan analisis lainnya.

4. Triangulasi Teori

Triangulasi ini berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaan dengan satu atau lebih teori tetapi hal itu dapat dilakukan, dalam hal ini dinamakan penjelasan banding.

Dari empat macam teknik triangulasi diatas, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber (data) untuk menguji keabsahan data yang berhubungan dengan masalah penelitian yang diteliti oleh peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindita, M. 2015. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kunjungan Ke Kolam Renang Boja*. Semarang: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Basuki, A. T dan Prawoto, N. 2014. *Pengantar Teori Ekonomi*. Yogyakarta: Mitra Pustaka Mandiri.
- Beratha, I. N. 1992. *Desa, Masyarakat Desa Dan Pembangunan*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia
- Hirawan, S. 2008. *Analisis Dampak Sosial Pariwisata di Indonesia*. Artikel. Maret 2009.
- Hutomo, M. Y. 2000. *Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi: Tinjauan teoritik dan implementasi*. (Diunduh dari www.bappenas.go.id/11 desember 2018)
- Irawan dan Suparmoko. 1992. *Ekonomi pembangunan, edisi pertama*. Yogyakarta: BPFE.
- Instruksi Mendagri Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa
- Kurniawan, W. 2015. *Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Pariwisata Umbul Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Moleong, J. L. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. remaja Rosdakarya.
- _____. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pendit, N. 1999. *Ilmu Pariwisata*. Jakarta: Akademi Pariwisata Trisakti
- Yoeti, O. A. 1983. *Pengantar ilmu pariwisata*. Bandung : Angkasa.
- _____. 2005. *Perencanaan Strategi Pemasaran Kabupaten Tujuan Wisata*. Jakarta : Pradaya Paramita.
- _____. 1997. *Perencanaan Dan Penegembangan Pariwisata*. jakarta : PT Pradnya paramita.
- Santosa, S. 2011. *Multiplier Efek Kampung Industri Kasongan*. *Wahana Informasi Pariwisata*: Media Wisata, 6 (1) 79-93.
- Sawe, J. 1996. *Konsep Dasar Pembangunan Pedesaan*. Bandung: APDN Press
- Susanto, I. 2016. *Perencanaan Pembangunan Pariwisata di Daerah (Studi Pelaksanaan Program pada (Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan)*. *JIAP* Vol. 2, No. 3, pp 1-9.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: penerbit alfabeta

- Soekanto, S. 2001. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Thoha, M. 1997. *Pembinaan Organisasi proses diagnosa dan intervensi*. Jakarta : PT. Raja Gravindo Persada.
- Todaro, M. P. 2006. *Pembangunan Ekonomi (edisi kesembilan, jilid I)*. Jakarta: Erlangga.
- , 2006. *Pengembangan Ekonomi Dunia Ketiga Edisi Kedelapan*. Jakarta: Erlangga.
- , 2000. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Tjiptono, F. 2000. *Manajemen Jasa, Edisi Kedua*. Yogyakarta : Andy offset.
- UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Kewenangan Desa.
- UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa.
- UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.
- Pasal 27 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Tugas Pokok Kepala Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Desa.
- Wahab, S. 2003. *Manajemen Kepariwisataaan*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Zainun, B. 1990. *Administrasi Dan Manajemen Kepegawaian Pemerintahan*. Jakarta: Haji masagung.